

PORTOFOLIO AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Anggota Kelompok:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Suci Tri Wahyuni | 2313031012 |
| 2. Rieke Nindita Sari | 2313031019 |
| 3. Diah Arum Sari Nawang Ulan | 2313031021 |
-

Artikel 1

Judul Artikel : Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Sektor Publik

Link Jurnal: <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jbmws/article/view/1160>

Analisis:

Artikel ini mengeksplorasi evolusi dan dampak transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sektor publik dengan menggunakan pendekatan bibliometrik. Fokusnya pada bagaimana praktik pelaporan keuangan publik berubah dari sekadar memenuhi kewajiban administratif menjadi alat tata kelola dan integritas yang lebih kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan publik sangat penting keduanya berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan. Transparansi dianggap membantu mengurangi peluang korupsi, memperkuat audit internal/eksternal, serta memastikan bahwa penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai kesimpulan, artikel ini menegaskan bahwa kualitas pelaporan keuangan publik berperan krusial dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemerintah sehingga menjadi referensi kuat untuk portofolio tentang akuntansi sektor publik.

Artikel 2

Judul Artikel : Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah

Link Jurnal: <https://ojs.unm.ac.id/JPB/article/view/32547>

Analisis:

Artikel ini mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui indikator perencanaan anggaran, realisasi anggaran, pelaporan, dan pengawasan. Penelitian bertujuan untuk melihat apakah mekanisme pengelolaan anggaran daerah sudah berjalan akuntabel sesuai prinsip value for money. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dinilai efektif, namun masih terdapat temuan pada tahap pelaporan dan monitoring yang menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan ke publik.

Kelebihan artikel ini adalah pendekatan evaluatif yang komprehensif dari tahap perencanaan hingga monitoring, sehingga cocok sebagai referensi portofolio analisis kebijakan keuangan sektor publik. Kekurangannya adalah kurang menggali dampak pengelolaan keuangan terhadap kualitas layanan publik secara langsung. Untuk portofolio, disarankan menambahkan rekomendasi seperti penguatan kompetensi SDM pengelola keuangan dan penerapan dashboard monitoring anggaran berbasis digital.

Artikel 3

Judul Artikel : Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa Di Indonesia

Link Jurnal : <https://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/download/681/601>

Analisis:

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan perlakuan akuntansi atas transaksi keuangan yang terjadi di entitas desa. Tulisan membahas tentang kebijakan akuntansi, proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan analisis keuangan desa. Tulisan ini didasarkan pada penelitian deskriptif yang menjelaskan bagaimana akuntansi dapat mempengaruhi perilaku kepala desa. Ruang lingkup transaksi keuangan entitas desa relatif lebih kecil dari pemerintah daerah, namun mencakup semua rekening yang terdapat dalam pemerintah daerah. Ada banyak peraturan yang menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan dapat mengakibatkan kompleksitas pada petugas

akuntansi desa. Masalah lainnya adalah kurangnya pengalaman dan pengetahuan akuntan desa yang menyusun laporan keuangan.

Ruang lingkup transaksi keuangan entitas desa relatif lebih kecil dari pemerintah daerah, namun mencakup semua rekening yang terdapat dalam pemerintah daerah. Ada banyak peraturan yang menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan dapat mengakibatkan kompleksitas pada petugas akuntansi desa. Masalah lainnya adalah kurangnya pengalaman dan pengetahuan akuntan desa yang menyusun laporan keuangan. Selain dana transfer APBN terdapat juga dana alokasi desa yang berasal dari penerimaan pemerintah daerah sebesar 10% yang diberikan pada tiap-tiap desa. Pemberlakuan UndangUndang Desa menetapkan entitas desa sebagai entitas pelaporan. Entitas desa memiliki kewenangan yang lebih besar dalam hal belanja termasuk kewenangan untuk membentuk badan usaha desa. Perdebatan tentang desa sebagai entitas pelaporan atau entitas akuntansi masih dominan terjadi. Karya tulis ini tetap mengacu pada entitas desa sebagai entitas pelaporan.

Jurnal Nasional 1

Judul : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

Link Jurnal: <https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JEKP/article/view/3417/1586>

Analisis:

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Fokus studi pada hambatan penerapan SAP dan upaya solusi yang dilakukan pemerintah daerah agar mendapatkan opini audit yang lebih baik dari BPK. Temuan utama dalam jurnal ini adalah penerapan SAP berbasis akrual meningkatkan kualitas transparansi namun masih dibatasi oleh kapasitas SDM dan sistem IT. Hambatan terbesarnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (kompetensi akuntansi berbasis akrual), integrasi data, serta kendala prosedural dalam pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas daerah. Sedangkan upaya perbaikan yang dilakukan meliputi pelatihan SDM, penguatan pengendalian internal, dan peningkatan

koordinasi antarunit.

Informasi dalam jurnal ini memiliki kelebihan karena relevan dan aplikatif untuk portfolio karena menyentuh masalah implementasi nyata SAP di tingkat daerah, sehingga cocok sebagai studi kasus penerapan standar akuntansi sektor publik. Sedangkan kelemahannya adalah cakupan studi biasanya terbatas pada satu kabupaten sehingga *generalizability* ke konteks nasional perlu hati-hati. Metodologi dapat diperkuat dengan analisis komparatif antardaerah. Saran untuk penelitian ini ialah gunakan bagian ini untuk menyajikan *policy implications* (rekomendasi capacity building, digitalisasi, dan checklist implementasi SAP) serta hubungkan dengan standar nasional (PP/Peraturan terkait).

Jurnal Nasional 2

Judul : Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Link Jurnal: <file:///C:/Users/hp/Downloads/1588-6102-2-PB.pdf>

Analisis:

Jurnal ini meneliti pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan tingkat transparansi laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Tujuannya mengukur seberapa besar faktor akuntansi dan transparansi mampu menjelaskan variasi akuntabilitas kinerja. Terdapat informasi mengenai penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Selain itu transparansi laporan keuangan juga berkontribusi signifikan. Selain itu terdapat rekomendasi bahwa peningkatan implementasi akuntansi berbasis akrual dan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Informasi dalam jurnal ini memiliki kelebihan karena menyajikan bukti kuantitatif yang mendukung peran akuntansi sektor publik sebagai alat *governance* yang cocok untuk bagian analitis portofolio yang ingin mengaitkan teori ke bukti empiris. Selain itu terdapat kelemahan detail tentang ukuran transparansi, indikator akuntabilitas, dan teknik sampling perlu dijelaskan agar pembaca bisa menilai validitas generalisasi. Jika tersedia, lampirkan tabel statistik (koefisien, p-value, R²). Saran

untuk penelitian ini ialah gabungkan hasil ini dengan contoh kebijakan / instrumen yang meningkatkan transparansi (mis. portal keterbukaan data keuangan daerah) dan tunjukkan langkah-langkah praktis yang diambil instansi.

Jurnal Nasional 3

Judul : Efek Pelanggaran Standar Akuntansi Pemerintahan dan Ketidakpatuhan Peraturan terhadap Opini Audit Laporan Keuangan di Sulawesi Selatan

Link Jurnal:

<file:///C:/Users/hp/Downloads/admin,+24.+1481-BANGSAWAN+&+ABBAS.pdf>

Analisis:

Jurnal ini menganalisis konsekuensi pelanggaran Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap efektivitas pengawasan (mis. peran pembina, BPK, dan inspektorat daerah) serta dampaknya pada kepercayaan publik dan opini audit. Terdapat informasi menegnai pelanggaran SAP (mis-pengakuan pendapatan, salah klasifikasi aset/liabilitas, tidak konsistennya pencatatan) menurunkan kualitas laporan dan mendorong temuan pemeriksaan yang memerlukan tindak lanjut. Pengawasan yang lemah (keterbatasan kapasitas inspektorat/BPK internal) memperparah dampak; rekomendasi termasuk penguatan fungsi pengawasan dan sanksi administratif/teknis.

Informasi dalam jurnal ini memiliki kelebihan yaitu topik sangat relevan untuk portofolio karena menunjukkan aspek risiko dan *governance* yang cocok untuk bagian "*lessons learned*" dan rekomendasi reform. Namun terdapat kelemahan yaitu sering bersifat deskriptif; sebaiknya dilengkapi data kuantitatif frekuensi dan jenis pelanggaran untuk memberi gambaran skala masalah. Sehingga jurnal ini dapat digunakan untuk menyusun checklist audit internal dan rekomendasi perbaikan pengendalian internal yang konkret (mis. SOP verifikasi aset, rekonsiliasi berkala).

Jurnal Internasional 1

Judul : *Implementation of Government Accounting Standards During Pandemic and*

Internal Auditor Support in Preventing Fraud.

Link Jurnal : <https://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/EPAKT/article/view/780/417>

Analisis :

Membahas tentang penyelenggaraan akuntansi pemerintahan pada masa pandemi di Indonesia dan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel. Seluruh aparat pengawas intern pemerintah baik di pusat maupun daerah dituntut untuk terus menjaga terselenggaranya penanganan Covid-19 dan terus berkolaborasi, berinovasi, serta saling membantu untuk mewujudkan akuntabilitas penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah harus terus bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai auditor intern, serta seluruh pejabat pengawas intern di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penanganan pandemi covid-19 memerlukan kecepatan namun sekaligus ditegaskan bahwa kecepatan tidak boleh mengabaikan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik. Tulisan ini juga memaparkan tentang reformasi akuntansi sektor publik. Reformasi sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya berbasis kas harus berubah menjadi berbasis akrual. Dalam implementasinya muncul beberapa kendala, mulai dari perubahan pola pikir pelaku sektor publik, keterbatasan sumber daya manusia hingga kemauan politik masing-masing kepala daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, yaitu melalui telaah berbagai studi pustaka dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Data dapat diperoleh dari buku atau literatur seperti artikel, media daring, hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan judul artikel. Implikasi dari penelitian ini adalah implementasi akuntansi pemerintahan di masa pandemi harus tetap memenuhi akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai standar yang berlaku. Komite Standar Akuntansi Pemerintah telah menerbitkan pedoman penerapan Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintah yang relevan terkait dengan program dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19.

Jurnal Internasional 2

Judul : *The Effect of Internal Control Factors on the Accountability of the Auditor at the Inspectirate of Jombang District*

Link Jurnal : <https://doi.org/10.15294/jda.v9i2.9308>

Analisis :

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan wujud komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta memperjelas peran pengendalian intern. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh faktor-faktor pengendalian intern terhadap akuntabilitas auditor yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Jombang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Jombang yang berjumlah 35 auditor. Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode sensus dengan unit analisis sebanyak 35 auditor di Inspektorat Kabupaten Jombang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik multivariat dengan menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian yang digunakan adalah uji validitas, reliabilitas, dan pengujian hipotesis.

Hasil penelitian membuktikan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko manajemen, pengendalian aktivitas, komunikasi dan informasi, dan pemantauan berpengaruh terhadap akuntabilitas auditor di Inspektorat Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka simpulan yang dapat diambil adalah sebaiknya auditor pada Inspektorat Kabupaten Jombang memperhatikan dan menjaga kepatuhan pengendalian intern karena dengan demikian akuntabilitas auditor akan terjaga.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap negara berkewajiban melayani warga negara dan penduduknya untuk memenuhi hak dan kebutuhannya. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014

menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan. Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat atau pemangku kepentingan adalah kewajiban untuk melakukan audit atas laporan keuangan instansi pemerintah. (Mardiasmo, 2009) menjelaskan akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal menunjukkan pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal menunjukkan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2023

Link Jurnal:

<https://ppid.kotabogor.go.id/asset/images/web/files/lkpd-tahun-2023.pdf>

Analisis:

Laporan Keuangan ini merupakan dokumen resmi tahunan pemerintah kota yang mencakup neraca, laporan realisasi anggaran, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai standar penyusunan laporan keuangan publik di Indonesia. Dari laporan ini, kita bisa mengevaluasi posisi keuangan, likuiditas, kinerja anggaran, realisasi pendapatan dan belanja, serta arus kas pemerintah kota untuk periode 2023.

- Posisi keuangan & likuiditas: Karena laporan tersedia secara lengkap, dapat diidentifikasi aset, kewajiban, serta aset neto memungkinkan analisis solvabilitas.
- Kinerja anggaran: Realisasi pendapatan dan belanja dibandingkan dengan anggaran memungkinkan penilaian efisiensi penggunaan anggaran dan rasio surplus/defisit.
- Arus kas & pembiayaan: Laporan memungkinkan menilai apakah kas operasi cukup untuk menutup belanja, serta mengevaluasi pembiayaan dan investasi daerah.
- Transparansi & akuntabilitas: Karena dokumen tersedia publik di situs resmi, ini menunjukkan komitmen transparansi memudahkan masyarakat dan akademisi untuk mengakses dan menganalisis.

Kelebihan dari laporan ini adalah penyajiannya lengkap dan resmi, sehingga cocok sebagai bahan portofolio atau studi kasus nyata. Namun, sebagai pengguna data,

perlu diperhatikan bahwa untuk analisis lebih dalam, diperlukan komparasi antarperiode (misalnya 2022 vs 2023) serta data kuantitatif-detail (rasio, tren, breakdown belanja per fungsi) agar analisis lebih tajam.

REFERENSI

- Bangsawan, A. A., & Abbas, A. (2021). *Efek pelanggaran standar akuntansi pemerintahan dan ketidakpatuhan peraturan terhadap opini audit laporan keuangan di Sulawesi Selatan*. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21(2).
- Sinurat, E. (2023). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu*. Jurnal Ilmu Pemerintahan IPDN.
- Wiyana, A., & (rekan penulis lain). (2023). *Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Transparansi Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Jurakun, STIEM Bongaya.
- Judijanto, L., Sudarmanto, E., & Triyantoro, A. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Sektor Publik. "Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science", 3(2), 223–233. <https://doi.org/10.58812/jbmws.v3i02.1160>
- Nurjannah, N., & Rahmat, A. (2023). Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah. "Jurnal Pembangunan Berkelanjutan", 4(1), 62–75. <https://ojs.unm.ac.id/JPB/article/view/32547>
- Pemerintah Kota Bogor. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2023. <https://ppid.kotabogor.go.id/asset/images/web/files/lkpd-tahun-2023.pdf>
- Mubaroka, Dia, Noor Shodiq Askandar, and Junaidi Junaidi. 2017. "Perlakuan akuntansi sektor publik desa (studi kasus di desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Jawa Timur)." Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi 6.09.

Hatijah, S., & Yuhertiana, I. (2020). *Implementation of Government Accounting Standards During Pandemic and Internal Auditor Support in Preventing Fraud*. EPAKT, (proceeding).

<https://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/EPAKT/article/view/780/417>

Febriana, L., Wardayati, S. M., & Prasetyo, W. (2017). *The Effect of Internal Control Factors on the Accountability of the Auditor at the Inspectirate of Jombang District*. Jurnal Dinamika Akuntansi, 9(2), 166–175.

<https://doi.org/10.15294/jda.v9i2.93>